

---

**PENGARUH PERENCANAAN ANGGARAN, PELAKSANAAN ANGGARAN,  
KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA, DAN PENGADAAN BARANG DAN JASA  
TERHADAP TINGKAT PENYERAPAN ANGGARAN DAERAH  
(STUDI EMPIRIS PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA SALATIGA)**

Muhammad Gustavo Puluala

Universitas Pembangunan Nasional "VETERAN", Yogyakarta, Indonesia

E-mail: [m.gustavopuluala@gmail.com](mailto:m.gustavopuluala@gmail.com)

---

**Abstrak**

Salah satu bentuk dari reformasi pengelolaan keuangan daerah dan implementasi dari otonomi daerah adalah Pemerintah Pusat dan Daerah. Dengan adanya ini maka pemerintah melahirkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang merupakan sumber pendanaan yang digunakan oleh pemerintah daerah dalam menjalankan roda pemerintahan untuk memberikan seluasluasnya kebijakan dalam membangun dan mengembangkan kesejahteraan daerahnya masing-masing sesuai dengan perundang-undangan. Permasalahan yang sering terjadi hingga saat ini di berbagai daerah di Indonesia, dalam pelaksanaan anggaran adalah tingkat penyerapannya yang rendah, hal tersebut terlihat pada Laporan Realisasi Anggaran. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: Pengaruh Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Kualitas Sumber Daya Manusia, dan Pengadaan Barang dan Jasa terhadap Tingkat Penyerapan Anggaran Daerah. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik kuesioner. Jumlah sampel dalam penelitian adalah 124 pengelola anggaran pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Salatiga dengan teknik pengambilan sampel sensus. Uji validitas menggunakan uji Pearson Correlation, sedangkan uji reliabilitas menggunakan Cronbach Alpha. Teknik analisis data yang digunakan adalah uji asumsi klasik, analisis regresi berganda, koefisien determinasi, uji F, dan uji t. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: variabel Perencanaan Anggaran dan Kualitas Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap Tingkat Penyerapan Anggaran Daerah. Sedangkan variabel Pelaksanaan Anggaran dan Pengadaan Barang dan Jasa tidak berpengaruh terhadap Tingkat Penyerapan Anggaran Daerah.

**Kata Kunci:** Tingkat Penyerapan Anggaran Daerah, Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Kualitas Sumber Daya Manusia, dan Pengadaan Barang dan Jasa.

**Abstract**

*One form of regional financial management reform and implementation of regional autonomy is the Central and Regional Governments. With this, the government gave birth to the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD), which is a source of funding used by local governments in running the wheels of government to provide the widest range of policies in developing and developing the welfare of their respective regions according to legislation. The problem that often occurs to date in various regions in Indonesia, in budget execution is the low absorption rate, this can be seen in the Budget Realization Report. This study aims to determine: The Effect of Budget Planning, Budget Implementation, Quality of Human Resources, and Procurement. Goods and Services to Regional Budget Absorption Rate. The data collection method in this research is using a questionnaire technique. The*

*number of samples in the study were 124 budget managers in the Salatiga City Regional Apparatus Organization using census sampling techniques. The validity test used the Pearson Correlation test, while the reliability test used Cronbach Alpha. The data analysis technique used is the classical assumption test, multiple regression analysis, the coefficient of determination, the F test and the t test. The results showed that: the Angagran Planning and Human Resources Quality variables affect the Regional Budget Absorption Rate. Meanwhile, the variables of Budget Implementation and Procurement of Goods and Services have no effect on the Regional Budget Absorption Rate.*

**Keywords:** *Regional Budget Absorption Rate, Budget Planning, Budget Implementation, Quality of Human Resources, and Goods and Services Procurement.*

---

## **Pendahuluan**

Fenomena yang dapat diambil dalam permasalahan penyerapan anggaran yang sering terjadi salah satunya terdapat di Pemerintahan Kota Salatiga yang mengalami kurang maksimalnya penyerapan anggaran belanja dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP) Pemerintah Kota Salatiga tahun 2017 dengan realisasi belanja hanya mencapai 74,76 persen pada tahun 2017 dan mengalami penurunan sebesar 7,63 persen dari tahun 2016. Disamping itu menurut Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) tahun 2017 yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Jawa Tengah, Kota 4 Salatiga mendapat nilai CC, yang artinya tingkat akuntabilitas instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan hasil dari penggunaan anggaran negara/ daerah belum efektif, efisien, dan ekonomis. Tingkat penyerapan anggaran dipengaruhi oleh perencanaan anggaran yang diartikan sebagai suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia sehingga penting untuk dilakukan sebelum melakukan suatu kegiatan/ pekerjaan. Hal ini juga dirasa sesuai dengan permasalahan yang terjadi dalam LKjIP Kota Salatiga yaitu permasalahan fungsi penunjang urusan pemerintah belum optimalnya

kualitas perencanaan pembangunan dan perencanaan kegiatan perangkat daerah di Kota Salatiga (Ramdhani & Anisa, 2017). Selanjutnya permasalahan yang terjadi di Kota Salatiga yang dapat diambil dalam LKjIP tahun 2017 adalah kurangnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam bidang perencanaan, penganggaran, penelitian dan pengendalian pembangunan daerah serta koordinasi dan keselarasan perencanaan dalam pelaksanaan anggaran. Pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah, kualitas sumber daya manusia akan mempengaruhi penyerapan anggaran karena dalam menjalankan program dan kegiatan serapan anggaran akan semakin baik dengan SDM yang mengerti tugas pokok dan fungsinya. Selain permasalahan SDM juga terdapat ketidakefektifan pelaksanaan anggaran dalam koordinasi dan keselarasan perencanaan. Hal ini akan berdampak pada kurang maksimalnya penggunaan anggaran yang dapat mengakibatkan minimnya target serapan fisik dan keuangan pada setiap perangkat daerah. Maka dari itu perlu adanya pembenahan dalam pelaksanaan anggaran Pemerintah Kota Salatiga. Pelaksanaan anggaran merupakan tahapan pengelolaan keuangan yang harus dilaksanakan setelah proses perencanaan anggaran selesai. Proses pelaksanaan meliputi 5 pengaturan terhadap pengguna alat – alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan,

bagaimana cara melaksanakannya, waktu pelaksanaannya dan dimana tempat pelaksanaannya. Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan anggaran merupakan upaya – upaya untuk merealisasikan perencanaan anggaran yang telah dibuat. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh (Ramdhani & Anisa, 2017) dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh Perencanaan Anggaran, Kualitas Sumber Daya Manusia dan Pelaksanaan Anggaran Terhadap Penyerapan Anggaran dengan sampel Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Banten. Perbedaan dengan penelitian tersebut adalah penambahan variabel independen yaitu Pengadaan Barang dan Jasa dengan pertimbangan evaluasi dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP) Pemerintah Kota Salatiga tahun 2017 yang telah teraudit menunjukkan bahwa pengukuran kinerja peningkatan kualitas penataan ruang dan

infrastruktur dalam mendukung pertumbuhan wilayah secara merata menunjukkan perolehan hasil dengan nilai hanya dengan kategori cukup dengan evaluasi keterbatasan personil dibidang pelaksana pengadaan barang dan jasa yang bersertifikat sehingga terjadi kurang maksimalnya pelaksanaan barang dan jasa. Selain itu kurangnya keakuratan perencanaan dalam penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk pengadaan barang dan jasa sehingga HPS yang direncanakan tidak sesuai dengan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Berdasarkan latar belakang dan penelitian – penelitian terdahulu, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan judul Pengaruh Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Kualitas Sumber Daya Manusia, dan Pengadaan Barang dan Jasa Terhadap Tingkat Penyerapan Anggaran Daerah (Studi Empiris Pada OPD Kota Salatiga)”

## **Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian adalah Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan cara metode sensus Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini ditentukan dengan mengacu pendapat Suharsimi Arikunto, 2010 dimana jika peneliti mempunyai beberapa ratus subyek dalam populasi, mereka dapat menentukan kurang lebih 25 – 30 persen dari jumlah subyek tersebut. Jika jumlah anggota subyek dalam populasi hanya meliputi antara 100 hingga 150 orang, dan penelitian menggunakan angket sebaiknya subyek sejumlah itu diambil seluruhnya. Sehubungan jumlah populasi dalam penelitian ini sebanyak 124, maka sampel penelitian ini adalah semua populasi.

### Hasil dan Pembahasan

Penelitian ini menggunakan data primer yang dikumpulkan melalui kuesioner dan dibagikan kepada responden penelitian. Responden dalam penelitian ini adalah pegawai yang terlibat langsung dalam pengelolaan anggaran pada OPD di Kota Salatiga diantaranya pejabat pengguna anggaran, pejabat penatausahaan keuangan, pejabat pelaksana teknis kegiatan, dan bendahara pengeluaran yang terdiri dari: 1 Sekretariat Daerah, 1 Sekretariat DPRD, 1 Inspektorat, 20 Dinas, 4 Badan, dan 4 Kecamatan. Peneliti membagikan kuesioner kepada responden sebanyak 124 kuesioner. Kuesioner yang kembali sejumlah 117 kuesioner, dan kuesioner yang dapat diolah sejumlah 113 kuesioner, sedangkan 4 kuesioner lainnya tidak dapat diolah karena tidak diisi dengan lengkap. Data dan karakteristik responden secara lengkap dalam penelitian ini sebagai berikut

Tabel 1. Presentase Kuesioner

| Kuesioner | Jumlah | Presentase (%) |
|-----------|--------|----------------|
| Dikirim   | 124    | 100            |
| Kembali   | 117    | 94             |
| Diolah    | 113    | 91             |
| Tidak     | 7      | 6              |

| Kembali |   |   |
|---------|---|---|
| Tidak   | 4 | 3 |
| Diolah  |   |   |

Sumber: Data Primer diolah tahun 2019

Selain data primer, penelitian ini menggunakan analisis statistik deskriptif dalam penelitian ini meliputi rata-rata (mean), standar deviasi, nilai maksimal, nilai minimum dan jumlah data penelitian. Berikut ini hasil analisis statistik deskriptif data pada masing-masing variabel :

Tabel 2. Statistika Deskriptif Penelitian

|  | N   | Statistik Deskriptif |             |          |                   |
|--|-----|----------------------|-------------|----------|-------------------|
|  |     | Minimu<br>m          | Maximu<br>m | Mea<br>n | Std.<br>Deviation |
| Tingkat Penyerapan Anggaran Daerah Perencanaan | 113 | 2.30                 | 5.00        | 3.89     | .4794             |
| Pelaksanaan Anggaran Kualitas SDM              | 113 | 1.00                 | 4.30        | 2.67     | .653              |
| Pengadaan Barang dan Jasa                      | 113 | 2.90                 | 5.00        | 3.84     | .382              |
| Valid N (listwise)                             | 113 | 1.10                 | 4.30        | 2.64     | .604              |

Sumber: Data Primer, diolah menggunakan SPSS Versi 20

Pengujian validitas dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan fasilitas correlations bivariate pada SPSS. Kuesioner dikatakan valid jika pernyataan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang diukur oleh kuesioner tersebut yang diketahui apabila memiliki nilai signifikan pada level 0,05 (Ghozali, 2016). Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan hasil uji validitas terhadap indikator pertanyaan tiap variabel tersebut :

Tabel 3. Hasil Uji Validitas

| Variabel | Jumlah Butir Pertanyaan | Keterangan |
|----------|-------------------------|------------|
|----------|-------------------------|------------|

|                                    |          |       |
|------------------------------------|----------|-------|
| Tingkat Penyerapan Anggaran Daerah | 6 Butir  | Valid |
| Perencanaan Anggaran               | 10 Butir | Valid |
| Pelaksanaan Anggaran               | 7 Butir  | Valid |
| Kualitas SDM                       | 9 Butir  | Valid |
| Pengadaan Barang dan Jasa          | 7 Butir  | Valid |

Sumber: Data Primer diolah, 2019.

Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan fasilitas Cronbach Alpha yang terdapat dalam Statistical Product and Service Solution (SPSS). Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Kuesioner dikatakan reliabel jika memberikan nilai cronbach alpha > 0,6 (Ghozali, 2016). Hasil uji reliabilitas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. Hasil Uji Reliabilitas

| Variabel | Item | Cronbach's Alpha | Keterangan |
|----------|------|------------------|------------|
| Y        | 6    | 0.803            | Reliabel   |
| X1       | 10   | 0.729            | Reliabel   |
| X2       | 7    | 0.813            | Reliabel   |
| X3       | 9    | 0.687            | Reliabel   |
| X4       | 7    | 0.831            | Reliabel   |

Sumber: Data Primer diolah, 2019.

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk meramalkan bagan suatu keadaan yaitu naik turunnya variabel independen, bila dua atau lebih variabel independen sebagai faktor predictor dimanipulasi (dinaik turunkan nilainya). Analisis ini akan dilakukan jika jumlah variabel independen minimal dua. Hasil uji regresi linear berganda dapat ditunjukkan pada tabel berikut ini:

Tabel 5. Hasil Uji Analisis Regresi Berganda

| Model                     | Coefficients <sup>a</sup>   |            |                           |       | Sig. |
|---------------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|-------|------|
|                           | Unstandardized Coefficients |            | Standardized Coefficients | t     |      |
|                           | B                           | Std. Error | Beta                      |       |      |
| Constants                 | .408                        | .629       |                           | .648  | .518 |
| Perencanaan Anggaran      | .745                        | .125       | .490                      | 5.967 | .000 |
| Pelaksanaan Anggaran      | -.067                       | .071       | -.092                     | -.941 | .349 |
| Kualitas SDM              | .211                        | .101       | .168                      | 2.090 | .039 |
| Pengadaan Barang dan Jasa | -.041                       | .077       | -.052                     | -.535 | .594 |

a. Dependent Variable: Tingkat Penyerapan Anggaran Daerah Sumber: Data Primer, diolah dengan SPSS Versi 20.

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) pada intinya mengukur seberapa besar kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen (Ghozali, 2018). Koefisien determinasi yang berada pada kolom Adjusted R Square sebesar 0,365 yang menjelaskan bahwa variabel-variabel independen pada penelitian ini hanya dapat menjelaskan 36,5% variasi variabel dependen pada penelitian ini, yaitu Tingkat Penyerapan Anggaran Daerah. Artinya variabel independen Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Kualitas Sumber Daya Manusia, dan Pengadaan Barang dan Jasa mampu menjelaskan sebesar 0,365 atau 36,5% dari Tingkat Penyerapan Anggaran Daerah, sedangkan sisanya yaitu sebesar 63,5 % dijelaskan oleh variabel lain diluar dari penelitian ini. Hasil uji koefisien determinasi ( $R^2$ ) dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 6. Hasil Uji Koefisien Determinasi

| Model Summary <sup>b</sup> |                   |          |                   |                            |
|----------------------------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|
| Model                      | R                 | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |
| 1                          | .605 <sup>a</sup> | .365     | .323              | 1.000                      |

|   |                   | Square | Square | Error |
|---|-------------------|--------|--------|-------|
| 1 | .623 <sup>a</sup> | .388   | .365   | .382  |

a. Predictors: (Constant), Pengadaan Barang dan Jasa, Kualitas Sumber Daya Manusia, Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran b. Dependent Variable: Tingkat Penyerapan Anggaran Daerah Sumber: Data Primer, diolah dengan SPSS Versi 20.

Dalam penelitian ini pengujian secara simultan menggunakan Uji F atau ANOVA (*Analysis of Variance*). Pengujian ini dilakukan untuk melihat pengaruh secara bersama-sama antara masing-masing variabel independennya. Penelitian dikatakan memiliki model yang fit dengan data yang dimiliki apabila nilai probabilitas < 0,05 diukur dengan uji anova (Ghozali, 2018). Berikut hasil uji f adalah sebagai berikut:

Tabel 7. Hasil Uji Anova

| Model      | ANOVA <sup>a</sup> |     |             |        |                   |
|------------|--------------------|-----|-------------|--------|-------------------|
|            | Sum of Squares     | Df  | Mean Square | F      | Sig.              |
| Regression | 9.991              | 4   | 2.498       | 17.123 | .000 <sup>b</sup> |
| Residual   | 15.754             | 108 | .146        |        |                   |
| Total      | 25.746             | 112 |             |        |                   |

a. Dependent Variable: Tingkat Penyerapan Anggaran Daerah b. Predictors: (Constant), Pengadaan Barang dan Jasa, Kualitas Sumber Daya Manusia, Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran Sumber: Data Primer, diolah dengan SPSS Versi 20.

Berdasarkan hasil uji pada tabel diatas menunjukkan bahwa nilai signifikansi sebesar 0,000 atau dengan kata lain lebih kecil nilai probabilitas (p-value) sebesar 0,05. Berdasarkan hasil uji F tersebut, maka dapat dikatakan bahwa model persamaan regresi yang digunakan dalam penelitian ini dalam kondisi layak untuk diinterpretasikan.

Pengujian secara parsial dimaksudkan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh

masing-masing variabel bebas terhadap variabel dependennya. Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh masing-masing variabel independen secara individual terhadap variabel dependen, dilakukan dengan membandingkan p-value pada kolom Sig. masing-masing variabel independen dengan tingkat signifikan yang digunakan adalah 0,05. Jika p-value lebih kecil dari 0,05 maka dikatakan bahwa variabel-variabel independen secara parsial memiliki pengaruh terhadap variabel dependen (Ghozali, 2018). Hasil uji dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 8. Hasil Uji T Coefficients<sup>a</sup>

| Model                     | Unstandardized Coefficients |            | Standardized Coefficients |       | t    | Sig. |
|---------------------------|-----------------------------|------------|---------------------------|-------|------|------|
|                           | B                           | Std. Error | Beta                      | t     |      |      |
| Constant                  | .408                        | .629       |                           | .648  | .518 |      |
| Perencanaan Anggaran      | .745                        | .125       | .490                      | 5.967 | .000 |      |
| Pelaksanaan Anggaran      | -.067                       | .071       | -.092                     | -.941 | .349 |      |
| Kualitas SDM              | .211                        | .101       | .168                      | 2.090 | .039 |      |
| Pengadaan Barang dan Jasa | -.041                       | .077       | -.052                     | -.535 | .594 |      |

a. Dependent Variable: Tingkat Penyerapan Anggaran Daerah. Sumber: Data Primer, diolah dengan SPSS Versi 20.

Hasil hitung statistik menunjukkan variabel Perencanaan Anggaran (X<sub>1</sub>) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000 atau lebih kecil dari 0,05. Hal tersebut dapat dikatakan bahwa hipotesis pertama (H<sub>1</sub>) diterima sehingga dapat dikatakan bahwa Perencanaan Anggaran berpengaruh terhadap Tingkat Penyerapan Anggaran Daerah. Jika perencanaan dilaksanakan sesuai dengan sasaran, maka hal ini akan mempengaruhi tindakannya dan mempengaruhi konsekwensinya terhadap sasaran. Dalam hal ini sarasannya adalah penyerapan anggaran sementara itu

perencanaan dapat diartikan sebagai suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan (prioritas), dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Hasil tersebut sejalan dengan pendekatan “normative” pada public finance theory (keuangan publik). Pendekatan normative menegaskan bahwa tingkat kematangan perencanaan berbanding lurus dengan hasil yang akan diperoleh. Dengan kata lain, semakin matang pengelola anggaran dalam merencanakan, maka program/kegiatan dalam satu tahun anggaran akan berjalan dengan baik, sehingga target penyerapan anggaran dapat tercapai. Hasil hitung statistik menunjukkan variabel Pelaksanaan Anggaran ( $X_2$ ) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,349 atau lebih besar dari 0,05. Hal tersebut dapat dikatakan bahwa hipotesis kedua ( $H_2$ ) tidak diterima sehingga dapat dikatakan bahwa Pelaksanaan Anggaran tidak berpengaruh terhadap Tingkat Penyerapan Anggaran Daerah. Pelaksanaan merupakan aktivitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk merealisasikan semua rencana dan kebijakan yang telah dirumuskan dan ditetapkan. Proses pelaksanaan anggaran meliputi persoalan-persoalan yang terjadi dalam internal satuan kerja, serta proses mekanisme pembayaran (pencairan anggaran). Kedua hal tersebut mempengaruhi besar kecilnya penyerapan anggaran (Kuswoyo, 2012). Namun keadaan seringkali mengganggu pelaksanaan anggaran yang dapat menyebabkan 22 tingkat penyebaran menjadi buruk. Anggaran dengan perencanaan yang baik dapat saja dilaksanakan secara buruk, namun anggaran yang direncanakan secara buruk tidak mungkin dapat dilaksanakan dengan baik. Dari hasil observasi pada penelitian ini diketahui dalam variabel pelaksanaan anggaran masih terdapat permasalahan yang mungkin menjadi hal yang krusial yang dapat menyebabkan tingkat penyerapan anggaran menjadi buruk. Diketahui dalam frekuensi jawaban

responden dalam pelaksanaan anggaran, permasalahan yang masih terjadi saat ini yaitu salah dalam penentuan akun/ kode rekening sehingga perlu revisi DPA. Kemudian Astuti, Sadeli, dan Hidayat (2018) juga menyatakan Pelaksanaan Anggaran tidak menjadi permasalahan dalam penyerapan anggaran saat ini disebabkan karena sebagian proyek/program sejak awal tidak diikuti dengan jadwal yang jelas, ataupun jadwal tersebut hanya sebagai panduan bukan sebagai target pelaksanaan dan tidak ada inisiatif untuk melaksanakan program/proyek yang sudah ditetapkan karena menganggap waktu untuk pelaksanaan anggaran relatif lama. Demikian juga penelitian tersebut (Lusiana dalam Astuti, 2018) menyatakan bahwa kemampuan penyerapan anggaran dianggap baik dan berhasil apabila prestasi realisasi penyerapan sesuai dengan prestasi aktual fisik pekerjaan yang dapat diselesaikan dengan anggapan bahwa prestasi fisik aktual pekerjaan tersebut adalah relatif sama dengan target prestasi penyelesaian pekerjaan yang direncanakan. Secara sederhana, dari pendapat tersebut dapat dikatakan bahwa suatu penyerapan anggaran dikatakan baik apabila telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan. Sehingga semakin tinggi atau rendahnya pelaksanaan anggaran tidak memiliki pengaruh dalam tingkat penyerapan anggaran daerah. Hasil hitung statistik menunjukkan variabel Kualitas Sumber Daya Manusia ( $X_3$ ) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,039 atau lebih kecil dari 0,05. Hal tersebut dapat dikatakan bahwa hipotesis ketiga ( $H_3$ ) diterima sehingga dapat dikatakan bahwa Kualitas 23 Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap Tingkat Penyerapan Anggaran Daerah. Peningkatan kualitas sumber daya manusia harus dilakukan di segala bidang. Pemerintah daerah harus berupaya untuk lebih meningkatkan kualitas SDM karena peran sumber daya manusia diharapkan dapat meningkatkan kinerja organisasi dalam memberikan pelayanan prima

kepada masyarakat luas (Nugroho, 2017). Melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia akan mendorong kinerja pegawai pemerintah sesuai dengan yang diharapkan. Semakin tinggi kualitas sumber daya manusia semakin tinggi pula kinerja pemerintah, begitu juga sebaliknya semakin rendah kualitas sumber daya manusia maka semakin rendah kinerja pemerintah. Semua potensi sumber daya manusia tersebut sangat berpengaruh terhadap upaya organisasi dalam pencapaian tujuannya. Betapapun majunya teknologi, berkembangnya informasi, namun jika tanpa sumber daya manusia maka akan sulit bagi organisasi untuk mencapai tujuannya. Hasil hitung statistik menunjukkan variabel Pengadaan Barang dan Jasa ( $X_4$ ) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,594 atau lebih besar dari 0,05. Hal tersebut dapat dikatakan bahwa hipotesis keempat ( $H_4$ ) tidak diterima sehingga dapat dikatakan bahwa Pengadaan Barang dan Jasa tidak berpengaruh terhadap Tingkat Penyerapan Anggaran Daerah. Dilihat pada data jawaban responden penelitian mengungkapkan bahwa variabel pengadaan barang dan jasa dengan menggunakan indikator permasalahan yang sering terjadi menunjukkan tidak adanya permasalahan yang dapat mempengaruhi tingkat penyerapan anggaran daerah yang baik pada saat ini. Hal ini dapat disebabkan salah satunya telah dikembangkannya layanan terbaru dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (LKPP) yaitu Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). LPSE adalah layanan pengelolaan teknologi informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa secara elektronik. UKPBJ/ Pejabat Pengadaan pada 24 Kementerian/ Lembaga/ Perangkat Daerah yang tidak memiliki Layanan Pengadaan Secara Elektronik dapat menggunakan fasilitas Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang terdekat dengan tempat kedudukannya untuk melaksanakan

pengadaan secara elektronik. Selain memfasilitasi UKPBJ/ Pejabat Pengadaan dalam melaksanakan pengadaan barang/ jasa secara elektronik Layanan Pengadaan Secara Elektronik juga melayani registrasi penyedia barang dan jasa yang berdomisili di wilayah kerja Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang bersangkutan. Pengadaan barang/jasa secara elektronik akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat, memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan, mendukung proses monitoring dan audit dan memenuhi kebutuhan akses informasi yang real time guna mewujudkan clean and good government dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Maka dalam hal ini dengan adanya LPSE pemerintah daerah dapat melaksanakan anggaran dengan lebih efektif dan efisien dan tidak menyebabkan permasalahan dalam penyerapan anggaran. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sudah adanya sistem pengadaan barang dan jasa yang baik untuk meminimalisir rendahnya tingkat penyerapan anggaran daerah sehingga tingkah penyerapan anggaran daerah yang dihasilkan tidak terpengaruh oleh seberapa besarnya pengadaan barang dan jasa. Faktor yang mungkin harus dievaluasi dalam pengadaan barang dan jasa adalah keterbatasan pejabat/ pelaksana pengadaan barang/ jasa bersertifikat yang tertulis juga didalam LKjIP tahun 2017 Kota Salatiga yang berdampak pada kurang maksimalnya penyerapan anggaran karena ketidakmampuan pejabat pelaksana pengadaan barang dan jasa dalam melaksanakan pengadaan.

### **Kesimpulan**

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Kualitas Sumber Daya Manusia, dan Pengadaan Barang dan Jasa terhadap Tingkat Penyerapan Anggaran Daerah pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Salatiga yang dapat diambil kesimpulan, yaitu



perencanaan Anggaran berpengaruh terhadap Tingkat Penyerapan Anggaran Daerah pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Salatiga, pelaksanaan Anggaran tidak berpengaruh terhadap Tingkat Penyerapan Anggaran Daerah pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Salatiga, kualitas Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap Tingkat Penyerapan Anggaran Daerah pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Salatiga, pengadaan Barang dan Jasa tidak berpengaruh terhadap Tingkat Penyerapan Anggaran Daerah pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Salatiga.

### **Bibliografi**

- Ghozali, I. (2018). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25 (edisi kesembilan). Semarang: Universitas Diponegoro.
- Isyuniarto, I., & Andrianto, A. (2009). Pengaruh Waktu Ozonisasi Terhadap Penurunan Kadar Bod, Cod, Tss Dan Fosfat Pada Limbah Cair Rumah Sakit. *GANENDRA Majalah IPTEK Nuklir*, 12(1).
- Kuswoyo, I. D. (2012). Analisis atas Faktor-Faktor yang Menyebabkan Terkonsentrasinya Penyerapan Anggaran Belanja di Akhir Tahun Anggaran (Studi pada Satuan Kerja di Wilayah KPPN Kediri). [Yogyakarta]: Universitas Gadjah Mada.
- Nugroho, R. (2017). FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENYERAPAN ANGGARAN (Studi Persepsi Pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan). *Jurnal BPPK: Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan*, 10(1), 22–37.
- Ramdhani, D., & Anisa, I. Z. (2017). PENGARUH PERENCANAAN ANGGARAN, KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA DAN PELAKSANAAN ANGGARAN TERHADAP PENYERAPAN ANGGARAN PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

PROVINSI BANTEN. *Jurnal Riset Akuntansi Terpadu*, 10(1).



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)